



KAJIAN PETA AKTOR

SIAPA DI BALIK API?

Menelusuri Afiliasi Modal, Kekuasaan, dan Kelompok Usaha di Balik
Perusahaan Terindikasi Karhutla Tertinggi

Kajian Peta Aktor

SIAPA DI BALIK API?

Menelusuri Afiliasi Modal, Kekuasaan, dan
Kelompok Usaha di Balik Perusahaan
Terindikasi Karhutla Tertinggi

Tim Penulis:

Eksekutif Nasional WALHI

Penerbit:

Eksekutif Nasional WALHI

Jalan Tegal Parang no.14
Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790

T/F: +62 21 7919 3363/7941 673

E: informasi@walhi.or.id

W: <https://www.walhi.or.id>

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang



Gambar 1. Temuan area bekas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan. (dok. WALHI Kalimantan Selatan)



Ringkasan Eksekutif

Karhutla tahun 2026 menunjukkan bahwa risiko kebakaran masih terkonsentrasi pada konsesi perkebunan dan kehutanan yang dikuasai oleh kelompok usaha besar. Penelusuran terhadap perusahaan dengan *hotspot* tertinggi memperlihatkan bahwa banyak entitas terhubung melalui jaringan anak perusahaan, afiliasi bisnis, dan *beneficial owner* yang kompleks, termasuk yang melibatkan struktur kepemilikan lintas negara.

Temuan ini menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan perusahaan pemegang izin di tingkat operasional. Manfaat ekonomi, pengambilan keputusan, dan pengendalian usaha kerap berada pada tingkat grup korporasi yang lebih luas. Karena itu, pendekatan pertanggungjawaban yang hanya berfokus pada satu entitas perusahaan berpotensi mengabaikan aktor-aktor utama di balik penguasaan dan pemanfaatan lahan. Konsentrasi *hotspot* juga ditemukan pada kawasan yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke, menandakan bahwa risiko karhutla berkaitan tidak hanya dengan praktik korporasi, tetapi juga dengan tata kelola pembangunan skala besar dan pengelolaan lanskap.

Empat temuan utama:



Modal asing di balik konsesi berisiko tinggi

Sembilan korporasi dengan titik panas paling tinggi teridentifikasi memiliki pemegang saham atau induk usaha di Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga yurisdiksi rahasia (BVI, Samoa). Kasus paling mengkhawatirkan adalah PT Mayawana Persada, yang penerima manfaat akhirnya tidak dapat diidentifikasi karena struktur kepemilikan bermuara pada secrecy jurisdiction. Total 84 perusahaan lain juga teridentifikasi terafiliasi dengan grup asal Malaysia dan Singapura, termasuk Sinar Mas, Wilmar, dan Salim Group yang secara hukum berbasis di Singapura.



Keterkaitan lima sosok dekat Presiden

Iwan Bomba (Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan) di PT Golden Blossom Sumatera; dan **Edhy Prabowo** (Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran), **Widjono Hardjanto** (Wakil Ketua Harian Gerindra/Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran), dan **Benny Pangbin** (Ketua Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi Kader Gerindra) di PT Kiani Lestari, serta **Aburizal Bakrie** (Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran) di PT Monrad Intan Barakat.





Dua konglomerat mendominasi PSN Papua

Dari 807 titik panas di Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, 90 titik panas pada enam entitas PSN Energy Estate terpusat pada First Resources dan Wilmar International. Sisanya, 674 titik panas, berada di area yang diampu langsung oleh Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian—menunjukkan tanggung jawab ganda antara korporasi dan negara.



Pola afiliasi berulang dan pertanggungjawaban

Kelompok usaha yang sama (First Resources, Sinar Mas, Wilmar) muncul berulang di berbagai entitas berbeda badan hukum, mengindikasikan persoalan karhutla bersifat struktural di tingkat kelompok usaha (corporate group), bukan sekadar kelalaian anak usaha secara individual.



Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pola karhutla pada perusahaan dengan hotspot tertinggi berkaitan dengan struktur korporasi yang lebih luas daripada sekadar perusahaan pemegang izin. Keterhubungan antarperusahaan dalam satu kelompok usaha, keberadaan pemilik manfaat yang tidak selalu mudah ditelusuri, serta keterlibatan aktor ekonomi dan politik menunjukkan bahwa analisis karhutla perlu dilakukan tidak hanya pada tingkat operasional, tetapi juga pada tingkat kelompok usaha dan jaringan aktor yang berada di balik penguasaan konsesi.

A

Latar Belakang



Kebakaran hutan dan lahan¹ (karhutla) terus berlangsung sepanjang 2026. Analisis citra satelit WALHI juga menunjukkan bahwa hampir 50 persen titik panas terindikasi berada di areal kerja korporasi sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Terdapat kurang lebih 30.927 titik panas sepanjang Januari–September 2026, dengan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan konsentrasi tertinggi, yakni 9.529 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah sebanyak 7.141 titik panas. Kondisi ini menyebabkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di dua provinsi tersebut secara konsisten berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.

Selama 1 Januari–7 September 2026, sebanyak 9.951 titik panas tersebar di 561 areal kerja perusahaan sawit dan 293 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di sejumlah provinsi di Indonesia. Provinsi dengan titik panas tertinggi adalah Kalimantan Barat, dilanjutkan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Papua Barat, Maluku, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Beberapa perusahaan juga tercatat mengalami kebakaran berulang yang pernah dilaporkan WALHI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023.² Misalnya, PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat, PT Rimbun Seruyan di Kalimantan Tengah, PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau, PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan, dan PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Jambi.

Temuan titik panas di areal konsesi bukan sekadar soal siapa yang melakukan pembakaran, tetapi juga siapa yang lalai mencegah kebakaran dan mengapa negara membiarkan situasi tersebut terus berulang. Analisis ini menunjukkan bahwa peristiwa karhutla merupakan konsekuensi dari

1 Hutan dan lahan di sini mencakup wilayah dengan jenis tanah mineral dan gambut. Tanah mineral didominasi oleh partikel anorganik seperti pasir, lanau, dan lempung, sedangkan tanah gambut terbentuk dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang belum sempat membusuk sepenuhnya dalam jangka waktu ribuan tahun, akibat kondisi lingkungan yang selalu basah, tergenang air, dan miskin oksigen.

2 “WALHI Laporkan 194 Perusahaan yang Terduga Terbakar,” WALHI, 21 Oktober 2026, <https://www.walhi.or.id/walhi-laporkan-194-perusahaan-yang-terduga-terbakar>

kegagalan tata kelola perizinan, mulai dari penerbitan perizinan di atas ekosistem gambut, pengawasan yang buruk, hingga kegagalan penegakan hukum. Karena itu, penelusuran terhadap perusahaan yang memiliki konsentrasi titik panas tinggi perlu dilanjutkan tidak hanya pada level entitas pemegang izin, tetapi juga pada struktur kepemilikan dan jaringan korporasi yang berada di belakangnya.

Kajian “Siapa di Balik Api?” disusun untuk mengidentifikasi dan memetakan pihak-pihak yang berada di balik perusahaan dengan jumlah titik panas dan/atau kejadian kebakaran yang tinggi, termasuk hubungan antara perusahaan pemegang izin dengan perusahaan induk, pemegang saham, pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*), kelompok usaha, maupun entitas yang berada di yurisdiksi lain. Penelusuran ini penting untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan yang terindikasi memiliki titik panas tinggi merupakan entitas yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari jaringan korporasi yang lebih besar, termasuk keterhubungan dengan pemodal dan perusahaan asing.

Selain memetakan struktur kepemilikan, kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi pola penguasaan dan konsentrasi kepemilikan sumber daya alam serta melihat hubungan antara struktur korporasi dengan rekam jejak pengelolaan areal yang berulang kali mengalami kebakaran. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada nama perusahaan yang tercantum dalam dokumen perizinan, tetapi berupaya menjawab pertanyaan mengenai siapa pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penguasaan dan pemanfaatan areal tersebut, bagaimana jaringan korporasinya terbentuk, dan sejauh mana tanggung jawab dapat ditelusuri hingga pada tingkat perusahaan induk atau pemilik manfaat.

Penelusuran tersebut menjadi penting dalam konteks penegakan hukum dan evaluasi perizinan. Identifikasi terhadap struktur kepemilikan dapat menjadi dasar untuk mendorong transparansi korporasi, evaluasi terhadap perusahaan yang berulang kali mengalami kebakaran, serta memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak berhenti pada entitas operasional di lapangan, tetapi juga mempertimbangkan keterhubungan dan tanggung jawab korporasi dalam satu kelompok usaha. Pada saat yang sama, kajian ini diharapkan dapat memperkuat dorongan evaluasi dan pencabutan izin perusahaan yang terbukti bermasalah, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan ekosistem dan hak-hak masyarakat yang terdampak karhutla.

B

Metode



WALHI menyusun kajian dengan menggunakan pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan fokus pada penelusuran jejak korporasi dan analisis spasial untuk mengidentifikasi perusahaan yang terindikasi bertanggung jawab atas kejadian karhutla, sekaligus menelusuri aktor yang terhubung di balik entitas tersebut. Metode kajian dibagi dalam dua fase. Pertama adalah penentuan perusahaan berbasis baseline titik panas (*hotspot*) dengan tingkat kepercayaan tinggi.³ Data titik panas diperoleh dari sumber penginderaan jauh seperti NASA FIRMS, MODIS, VIIRS, maupun SiPongi KLHK, kemudian disaring secara ketat dengan hanya menggunakan data tingkat kepercayaan tinggi di atas 80 persen untuk meminimalkan kesalahan deteksi. Selanjutnya dilakukan analisis spasial menggunakan perangkat GIS melalui proses *overlay* antara lokasi *hotspot* dan batas konsesi perusahaan, seperti HGU perkebunan sawit maupun izin usaha kehutanan. Hasilnya berupa daftar 30 perusahaan yang terindikasi memiliki titik kebakaran tertinggi dalam wilayah konsesinya.

Kedua, kajian ini berfokus pada analisis keterhubungan aktor melalui data sekunder, dokumen perusahaan dan data Administrasi Hukum Umum (AHU). Penelusuran dilakukan terhadap struktur kepemilikan, direksi, komisaris, dan hubungan antar perusahaan untuk mengidentifikasi *ultimate beneficial owner* serta pola kendali korporasi. Informasi tersebut dikonfirmasi melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, prospektus, dan dokumen korporasi lainnya. Seluruh data kemudian disusun ke dalam matriks keterhubungan aktor untuk mengidentifikasi praktik keterhubungan aktor, hubungan kepemilikan silang, serta pengelompokan perusahaan dalam satu konglomerasi yang sama.

3 Skor tingkat kepercayaan yang tinggi menunjukkan probabilitas kebakaran hutan atau lahan yang sedang berlangsung sebesar 80 hingga 100 persen pada skala deteksi satelit (dibandingkan dengan tingkat sedang: 30–79, dan rendah: 0–29).



Gambar 2. Temuan dugaan Kebakaran Hutan dan Lahan di PT Kintap Jaya Wattindo, September 2026. (dok. WALHI Kalimantan Selatan)

Baseline Kajian



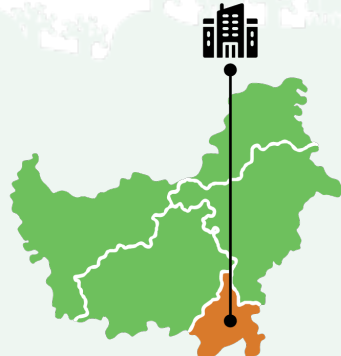
WALHI melakukan penelusuran terhadap afiliasi korporasi, struktur kepemilikan, dan identitas beneficial owner dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan konsesi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi sepanjang Januari-Agustus 2026. Analisis dilakukan terhadap 30 entitas perusahaan yang terdiri atas 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 15 pemegang izin PBPH sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2. Selain itu, kajian ini juga melakukan analisis terhadap perusahaan yang sudah dilakukan pemantauan lapangan dan terkonfirmasi mengalami kebakaran, yaitu:

PT Golden Blossom Sumatra
di Sumatera Selatan



Pulau Sumatera

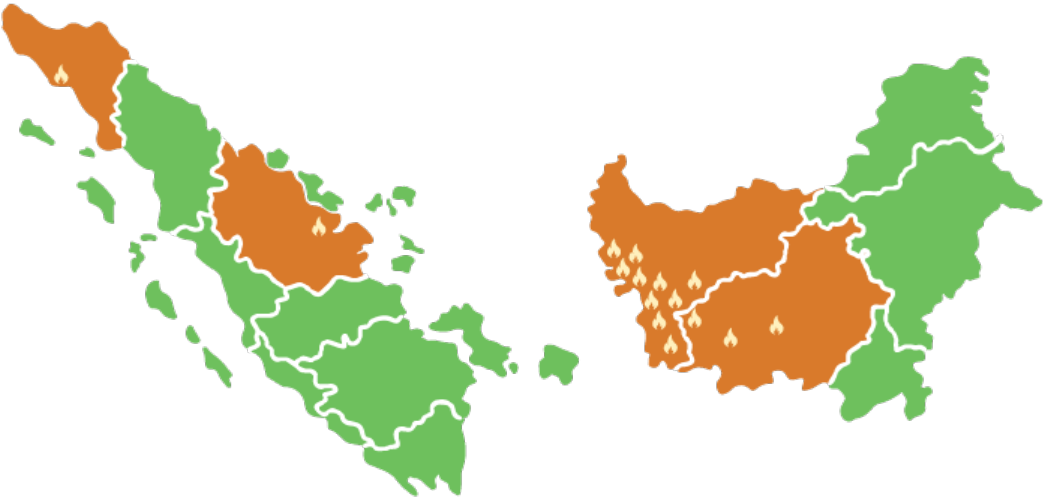
PT Monrad Intan Barakat
di Kalimantan Selatan



Pulau Kalimantan

Kami juga menambahkan analisis khusus untuk wilayah Papua, di mana tercatat ada setidaknya 807 titik api dari 1 Januari hingga 31 Agustus 2026 yang terdeteksi di kawasan pengembangan Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan (lihat daftarnya di Tabel 5).

Top 15 Konsesi Perkebunan Sawit dengan Hotspot Tertinggi (1 Januari- 31 Agustus 2026)



Kepulauan Sumatera dan Kalimantan

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kab / Kota	Jumlah Hotspot
1	PT Mekar Karya Kahuripan	Kalimantan Barat	Ketapang	312
2	PT Sinar Karya Mandiri	Kalimantan Barat	Ketapang	254
3	PT Kayung Agro Lestari	Kalimantan Barat	Kayong Utara	229
4	PT Arjuna Utama Sawit	Kalimantan Tengah	Katingan	165
5	PT Ragam R. R	Kalimantan Barat	Kubu Raya	131
6	PT Sungai Putri Agro Sawit	Kalimantan Barat	Ketapang	126
7	PT Kalbar Inti Plantation	Kalimantan Barat	Melawi	116
8	PT Benua R. R.	Kalimantan Barat	Kubu Raya	93
9	PT Bumi Subur Lestari	Kalimantan Barat	Kubu Raya	77
10	PT Panca Surya Agrindo Sejahtera	Riau	Pelalawan	73
11	PT Sumber Mardhika Graha	Kalimantan Tengah	Lamandau	69
12	PT Agro Majusejahtera	Kalimantan Barat	Ketapang	61
13	PT Gelora Sawita Makmur	Aceh	Nagan Raya	50
14	PT Jalin Vaneo	Kalimantan Barat	Kayong Utara	46
15	PT Globalindo Alam Perkasa	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	46

Tabel 1

Top 15 Perusahaan PBPH dengan Hotspot Terbanyak (1 Januari– 31 Agustus 2026)

Kepulauan Indonesia

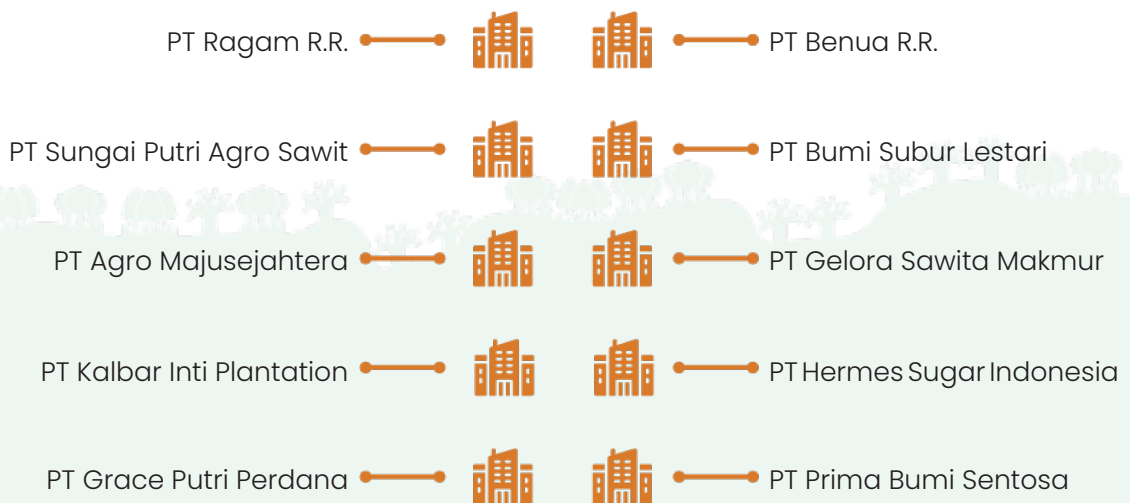


No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kab / Kota	Jumlah Hotspot
1	PT Bumi Mekar Hijau	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	552
2	PT Finnantara Intiga	Kalimantan Barat	Sanggau	189
3	PT Inhutani Ili Nangapinah	Kalimantan Barat	Melawai	188
4	PT Mayawana Persada	Kalimantan Barat	Kayong Utara	176
5	PT Hutan Ketapang Ind (Dh. Kertas Basuki R)	Kalimantan Barat	Ketapang	142
6	PT Grace Putri Perdana	Kalimantan Barat	Ketapang	138
7	PT Hermes Sugar Indonesia	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	90
8	PT Kiani Lestari.	Kalimantan Timur	Kutai Timur	88
9	PT Prima Bumi Sentosa	Kalimantan Barat	Ketapang	87
10	PT Inhutani I (Unit Labanan)	Kalimantan Timur	Berau	83
11	PT Bumi Hijau Prima	Kalimantan Tengah	Kapuas	74
12	PT Arfak Indra	Papua Barat	Fak Fak	71
13	PT Merbau Pelalawan Lestari	Riau	Palalawan	68
14	PT Wahana Samudera Sentosa	Papua Selatan	Marauke	64
15	PT Wanakerta Ekalestari	Kalimantan Barat	Ketapang	46

Tabel 2

Berdasarkan hasil penelusuran data AHU, OSS, laporan perusahaan, publikasi korporasi, dan berbagai sumber terbuka lainnya, WALHI berhasil mengidentifikasi afiliasi maupun struktur kepemilikan sebanyak 22 perusahaan. Penelusuran ini menunjukkan bahwa 20 perusahaan yang berada dalam konsesi dengan tingkat *hotspot* tinggi dan 2 perusahaan yang terbukti terbakar memiliki keterhubungan melalui kepemilikan saham, kesamaan pengurus, maupun hubungan pengendalian dengan kelompok usaha yang lebih besar.

Sementara itu, sebanyak 10 perusahaan belum dapat diidentifikasi secara memadai, baik terkait struktur kepemilikan, susunan pengurus, maupun identitas *beneficial owner*-nya. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi:



Keterbatasan identifikasi tersebut terutama disebabkan oleh minimnya keterbukaan informasi korporasi pada perusahaan tertutup (*non-listed company*), terbatasnya akses publik terhadap data pemegang saham dan pengurus perusahaan, serta tidak tersedianya informasi yang memadai dalam basis data AHU maupun sumber terbuka lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi kepemilikan korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan masih menjadi tantangan penting yang berpotensi menghambat pengawasan publik dan upaya pertanggungjawaban atas risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi.

Afiliasi Korporasi di Balik Titik Panas



Bagian ini menguraikan pola afiliasi dan struktur kepemilikan korporasi-korporasi yang terhubung dengan sebaran titik panas tertinggi pada konsesi sawit maupun pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Penelusuran rantai kepemilikan menunjukkan bahwa persoalan karhutla pada konsesi-konsesi ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri di tingkat badan hukum individual, melainkan mencerminkan pola struktural yang melibatkan jaringan modal, kelompok usaha besar, hingga kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Setidaknya ada empat temuan utama yang dibahas. Pertama, keterlibatan modal asing yang signifikan pada korporasi-korporasi berisiko tinggi, dengan entitas induk maupun pemegang saham yang berkedudukan di Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga yurisdiksi rahasia (secrecy jurisdiction) seperti British Virgin Islands dan Samoa—kondisi yang mempersulit penegakan tanggung jawab hukum lingkungan lintas batas. Kedua, ditemukannya keterkaitan lima sosok dekat Presiden dalam struktur kepengurusan tiga korporasi pemegang izin PBPH dan sawit dengan titik panas high confidence, yang menimbulkan pertanyaan etika tata kelola sekaligus urgensi uji kepatutan (fit and proper) pengurus korporasi.

Ketiga, pengulangan afiliasi sejumlah kelompok usaha besar pada lebih dari satu entitas pemegang konsesi menegaskan bahwa praktik pembukaan lahan berisiko kebakaran bersifat struktural di tingkat kelompok usaha (corporate group), bukan semata kelalaian anak usaha secara terpisah—sehingga relevan ditelaah melalui doktrin corporate culture dan pertanggungjawaban kelompok usaha. Keempat, konsentrasi titik panas pada kawasan Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi di Merauke, Papua, yang bermuara pada dua konglomerasi besar (First Resources dan Wilmar International), sekaligus menyingkap dimensi pertanggungjawaban bersama karena sebagian besar titik panas lainnya berada di area yang secara kelembagaan diampu langsung oleh pemerintah (Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian).

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa penanganan karhutla pada konsesi-konsesi bermasalah memerlukan pendekatan yang menjangkau tidak hanya badan hukum anak perusahaan, tetapi juga kelompok usaha pengendali, pemilik manfaat lintas yurisdiksi, serta lembaga pemerintah yang mengampu proyek strategis nasional terkait.

Perusahaan yang Terafiliasi dengan Modal Asing

Penelusuran rantai kepemilikan terhadap korporasi-korporasi dengan sebaran titik panas tertinggi menunjukkan pola yang konsisten, yaitu keterlibatan entitas induk maupun pemegang saham asing yang berkedudukan di negara-negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan beberapa yurisdiksi luar kawasan seperti British Virgin Island (BVI), Samoa, Korea Selatan, dan India.

Perusahaan paling tinggi karhutla yang terafiliasi dengan modal asing

No	Korporasi	Grup / Pemegang Saham	Negara / Yuridiksi
1	PT Kayung Agro Lestari	First Resources	Singapura
2	PT Panca Surya Agrindo	First Resources	Singapura
3	PT Arjuna Utama Sawit	Saham dimiliki Premier Palmoil Energy Pte Ltd dan PT Oilim Agriculture (First Borneo Group)	Indonesia; Singapura
4	PT Sumber Mardhika Graha	PT Triputra Agro Persada Tbk; Salween Investment Pte Ltd; Gochean Holdings Incorporated	Singapura; Cayman
5	PT Finnantara Intiga	Nordic Forest Development Pte Ltd	Singapura
6	PT Hutan Ketapang Industri	Sampoerna Agri Resources Pte Ltd	Singapura
7	PT Mayawana Persada	Green Ascend Group Limited; Balaji Investment Group Holdings Limited	British Virgin Islands (BVI); Samoa
8	PT Hermes Sugar Indonesia	Hermes Distillery Pvt Ltd	India
9	PT Globalindo Alam Perkasa	Musim Mas	Singapura

Tabel 3

Tabel di atas menunjukkan sedikitnya delapan korporasi dengan sebaran titik panas tertinggi yang teridentifikasi memiliki keterkaitan kepemilikan, baik langsung maupun berlapis, dengan entitas induk atau pemegang saham yang berkedudukan di negara tetangga maupun yurisdiksi di luar kawasan. PT Kayung Argo Lestari dan PT Panca Surya Agrindo, yang keduanya merupakan bagian dari kelompok usaha First Resources setelah pengambilalihan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk oleh PT Ciliandra Perkasa

pada tahun 2025⁴. Perusahaan induknya, First Resources Limited, tercatat di Bursa Efek Singapura sehingga rantai kendali atas kedua entitas tersebut turut tunduk pada rezim hukum pasar modal Singapura, di luar yurisdiksi hukum Indonesia semata.⁵

Selain itu, ada PT Arjuna Utama Sawit yang dimiliki oleh First Borneo Group melalui Premier Palmoil Energy Pte Ltd—dengan penguasaan saham sejumlah 63.3%—yang berkedudukan di Singapura.⁶ Premier Palmoil Energy Pte Ltd sepenuhnya dimiliki oleh Tableware Incorporated Pte Ltd, yang sahamnya terbagi rata antara Alexander Thaslim dan Chan Lucille Caroline. Sisa 36.67% saham PT Arjuna Sawit Utama dipegang oleh PT Oilim Agriculture—perusahaan British Virgin Island—yang sahamnya dimiliki oleh PT Ceram Permata Pertiwi sebesar 60% yang jika ditelusuri, saham PT Ceram Permata Pertiwi pun dimiliki oleh Alexander Thaslim (30%) dan Caroline Lucille Chan (70%).⁸ Sementara itu, PT Sumber Mardhika Graha berada di bawah PT Triputra Agro Persada Tbk yang sejak tahun 2012 memiliki pemegang saham minoritas asing, yaitu Salween Investment Pte Ltd, kendaraan investasi Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dan Gochean Holdings Incorporated, kendaraan investasi yang sebagian dimiliki TPG Capital asal Kepulauan Cayman.⁹

Pada kelompok pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), keterlibatan modal asing tampak pada PT Finnantara Intiga, yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Nordic Forest Development Pte Ltd yang berkedudukan di Singapura, entitas yang terafiliasi dengan

4 “Selesai Akuisisi, First Resources Lanjutkan Tender Wajib ANJT Rp1.813 per Saham,” *Bisnis.com*, 25 Agustus 2025, <https://market.bisnis.com/read/20250825/192/1905206/selesai-akuisisi-first-resources-lanjutkan-tender-wajib-anjt-rp1813-per-saham>

5 “Austindo (ANJT) Rombak Pengurus Usai Diakuisisi First Resources,” *Bisnis.com*, 7 Mei 2025, <https://market.bisnis.com/read/20250507/192/1875266/austindo-anjt-rombak-pengurus-usai-diakuisisi-first-resources>.

6 “Premier Palmoil Energy Pte. Ltd.,” *SGPBusiness*, <https://www.sgpbusiness.com/company/Premier-Palmoil-Energy-Pte-Ltd>.

7 International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), “Premier Palmoil Energy Pte. Ltd.,” *Offshore Leaks Database*, <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12170972>.

8 Mighty Earth, *Rapid Response Report No. 23 (Januari 2020)*, https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/Rapid-Response-Report-23_final.pdf; Mighty Earth, *Rapid Response Report No. 49 (Maret 2025)*, https://mightyearth.org/wp-content/uploads/2025/10/RR49_v3.pdf.

9 Bursa Efek Indonesia, [dokumen keterbukaan informasi PT Triputra Agro Persada Tbk], April 2021, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202104/960f00ca8c_d89a475e3a.pdf. ; PT Triputra Agro Persada Tbk, *Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham (Jakarta: PT Triputra Agro Persada Tbk., 1 April 2021)*, https://www.idx.co.id/media/9769/14_tapg-prospektus-ipo-2021.pdf.; “Entitas Usaha Triputra Group di Bidang Agribisnis Bakal IPO, Lepas 925 Juta Saham,” *Bisnis.com*, 18 Maret 2021, <https://market.bisnis.com/read/20210318/192/1369276/entitas-usaha-triputra-group-di-bidang-agribisnis-bakal-ipo-lepas-925-juta-saham>.

kelompok usaha Stora Enso asal Finlandia, dengan sisa saham dipegang oleh PT Purinusa Ekapersada, induk korporasi grup Sinar Mas/Asia Pulp & Paper (APP).¹⁰ PT Globalindo Alam Perkasa yang meskipun merupakan kepemilikan keluarga karim, akan tetapi berada di bawah bendera Musim Mas Group (Musim Mas Holdings Pte. Ltd yang berkantor pusat di Singapura).¹¹ Selain itu, ada PT Hutan Ketapang Industri, yang delapan puluh persen sahamnya beralih kepada Sampoerna Agri Resources Pte Ltd asal Singapura pada November 2025, tidak lama setelah induk usahanya, Sampoerna Agro Tbk, dilepas oleh Grup Sampoerna Strategic kepada AGPA Pte Ltd, anak usaha POSCO International Corporation asal Korea Selatan.¹²

Kasus paling mengkhawatirkan dari sisi transparansi kepemilikan adalah PT Mayawana Persada, yang sejak akhir tahun 2022 dan 2023 seluruh sahamnya beralih kepada Green Ascend Group Limited berkedudukan di British Virgin Islands (BVI) dan Balaji Investment Group Holdings Limited berkedudukan di Samoa, dua yurisdiksi yang dikenal luas sebagai secrecy jurisdiction dan tidak membuka data pemegang saham kepada publik, sehingga penerima manfaat akhir dari perusahaan ini tidak dapat diidentifikasi hingga kajian ini disusun.¹³ Sejumlah investigasi independen turut menduga keterkaitan PT Mayawana Persada dengan kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto, meskipun RGE membantah adanya kepemilikan atau bentuk kendali apa pun atas perusahaan.¹⁴ Meski begitu, pada Mei 2026 lalu, APRIL mengumumkan bahwa PT Mayawana Persada resmi menjadi pemasoknya.¹⁵

10 "Ringkasan Publik PT Finnantara Intiga 2025," Sustainability Dashboard, 2025, https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.FI_2025.pdf; "Riset Ungkap 20 Perusahaan Surga Pajak Berpusar ke Sinar Mas," CNN Indonesia, 29 Mei 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180529230606-92-302109/riset-ungkap-20-perusahaan-surga-pajak-berpusar-ke-sinar-mas>

11 Musim Mas, "Keberadaan Global," <https://www.musimmas.com/id/tentang-kami/keberadaan-global/>

12 "Jual 80% Saham Hutan Ketapang, SGRO Kantongin Duit Rp 990 Miliar," CNBC Indonesia, 28 November 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20251128095120-17-689275/jual-80-saham-hutan-ketapang-sgro-kantongin-duit-rp-990-miliar>; "Grup Sampoerna Jual Seluruh Saham SGRO kepada AGPA Pte. Ltd," Antara News, 20 November 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5253877/grup-sampoerna-jual-seluruh-saham-sgro-kepada-agpa-pte-ltd>

13 "Investigasi Mayawana: Pemilik Maya, Kerusakan Nyata," Betahita.id, 13 Mei 2024, <https://www.betahita.id/sorot/10098/investigasi-mayawana-pemilik-maya-kerusakan-nyata>; Mighty Earth, "Letter from Government Ministry Tells Indonesia's Largest Deforester to Stop Clearing," 23 April 2024, <https://mightyearth.org/article/letter-from-government-ministry-tells-mayawana-persada-to-stop-clearing/>

14 International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), "An 'Anonymous' Company Secretly Linked to an Indonesian Billionaire Is Destroying Borneo's Rainforests, Environmentalists Say," 2 Desember 2025, <https://www.icij.org/investigations/deforestation-inc/an-anonymous-company-secretly-linked-to-an-indonesian-billionaire-is-destroying-borneos-rainforests-environmentalists-say/>

15 APRIL Group, "APRIL Fiber Supply Source – APRIL Sustainability Dashboard," diperbarui per 31 Agustus 2026, <https://sustainability.aprilasia.com/april-fiber-supply-source/>

Perusahaan lain, PT Hermes Sugar Indonesia, menurut satu sumber disebutkan sembilan puluh lima persen sahamnya dipegang oleh Hermes Distillery Pvt Ltd asal India. Namun, karena keterangan ini hanya bersumber dari satu rujukan publik, informasi tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dapat disimpulkan secara meyakinkan.¹⁶

Konsentrasi keterlibatan modal asing pada korporasi-korporasi dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi ini memunculkan persoalan hukum tersendiri, yaitu terbatasnya efektivitas mekanisme pertanggungjawaban administratif dan perdata terhadap kerusakan lingkungan hidup ketika penerima manfaat akhir berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini relevan dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yang mewajibkan korporasi mengungkapkan pemilik manfaat sebenarnya, namun implementasinya belum optimal terhadap struktur kepemilikan berlapis yang bermuara pada yurisdiksi lepas pantai (offshore) seperti BVI dan Samoa.

Selain kedelapan perusahaan di atas, kami juga menelusuri negara asal atau negara penerima manfaat (beneficial owner) dari 372 perusahaan yang telah kami laporkan kepada Presiden, dengan fokus pada perusahaan yang terafiliasi dengan grup yang berbasis di Malaysia dan Singapura.

Ada setidaknya 27 perusahaan sawit asal Malaysia dan 66 perusahaan asal Singapura dengan rincian 52 perusahaan sawit dan 14 perusahaan dengan izin PBPH. Sebagai catatan, meski grup usaha seperti Sinar Mas, Wilmar, dan Salim Group dikenal berasal dari Indonesia, secara hukum mereka berbasis di Singapura karena induk usaha global mereka terdaftar, berkantor pusat, dan tercatat di Bursa Efek Singapura (SGX).¹⁷

Berikut adalah daftar perusahaan yang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan kedua negara tersebut:

16 Catatan: informasi kepemilikan PT Hermes Sugar Indonesia oleh Hermes Distillery Pvt Ltd (India) yang ditelusuri dalam kajian ini hanya bersumber dari satu rujukan publik, yaitu Eco-Nusa, sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelusuran data AHU Online. Lihat pada <https://econusa.id/id/publikasi/studi-rantai-pasok-gula-di-indonesia-timur/>

17 Singapore Exchange (SGX), "Highlights of Foreign Family Empires Listed on SGX," 9 Mei 2019, <https://www.sgx.com/research-education/market-updates/20190509-highlights-foreign-family-empires-listed-sgx>; IDX Channel, "9 Saham Milik Salim Group di Bursa Efek Indonesia, Intip Besaran Market Cap-nya," <https://www.idxchannel.com/amp/market-news/9-saham-milik-salim-group-di-bursa-efek-indonesia-intip-besaran-market-cap-nya>; Wilmar International, "Corporate Profile," <https://www.wilmar-international.com/about-us/corporate-profile>; dan Bursa Efek Indonesia (BEI), "Profil Perusahaan Tercatat: CEKA," <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/CEKA>.

Gambar 3. Temuan Kebakaran Hutan dan Lahan di PT Monrad Intan Barakat, September 2026. (dok. WALHI Kalimantan Selatan)

Data jumlah perusahaan terindikasi karhutla afiliasi grup dan asal negaranya

No	Afiliasi Grup	Asal Grup	Jumlah Perusahaan
1	Sinar Mas (termasuk APP)	Singapura	26
2	Wilmar	Singapura	21
3	Sime Darby	Malaysia	9
4	Genting Group	Malaysia	8
5	BHD Group	Malaysia	6
6	Musim Mas	Singapura	6
7	RGE/APRIL	Singapura	5
8	Lion Group	Malaysia	2
9	First Resources	Singapura	2
10	Salim Group	Singapura	2
11	Jcorp	Malaysia	1
12	Synergy Drive	Malaysia	1
13	Goodhope Asia Holdings Limited	Singapura	1
14	Premier Palmoil Energy Pte Ltd	Singapura	1
15	Salween Investment Pte Ltd	Singapura	1
16	Nordic Forest Development Holdings Pte Ltd	Singapura	1
17	TOTAL		93

Tabel 4

TEMUAN KEBAKARAN DI TIGA PERUSAHAAN ASAL SINGAPURA DI RIAU

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah perusahaan pemegang PBPH yang terafiliasi dengan APRIL/RGE Group, sementara PT Arara Abadi dan PT Sekato Pratama Makmur terafiliasi dengan APP/Sinar Mas Group. Keduanya berkedudukan di Singapura. Kebakaran hutan alam terjadi di areal kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau. Berdasarkan hasil pemantauan WALHI Riau dan analisis spasial citra Sentinel-2, kebakaran seluas $\pm 71,9$ ha ini berada di areal hutan rawa pada kawasan greenbelt yang berbatasan langsung dengan sungai. Kerusakan ekosistem akibat kebakaran di areal kerja PT RAPP juga turut mengancam keberlangsungan satwa dilindungi, salah satunya harimau Sumatera. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan kawasan transisi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu (GSKBB). Kemudian, kebakaran di konsesi PT Arara Abadi maupun di sekitarnya, terjadi sekitar penghujung Maret 2026. Jika dihitung seluruh hamparan terbakar baik di dalam maupun di luar izin perusahaan—tapi masih di sekitarnya—luasnya mencapai 616,3 hektar. Pada Minggu, 17 Mei 2026, terdapat aktivitas penanaman akasia pada area bekas terbakar. Hampir 400 meter dari batas kebakaran dalam konsesi PT Arara Abadi terdapat plang informasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Merujuk pada ringkasan publik 2026 perusahaan, kawasan itu memiliki tingkat keanekaragaman hayati penting serta bentang alam penting bagi dinamika ekologi secara alami. Terakhir, konsesi PT Sekato Pratama Makmur (SPM) mengalami kebakaran pada pertengahan hingga akhir Maret 2026. Luas terbakar keseluruhan, berdasarkan analisis citra satelit Sentinel-2, lebih kurang 115,3 hektar. Di lokasi terdapat informasi kawasan rawan terbakar dengan logo Polda Riau dan TNI Angkatan Laut. Kebakaran di konsesi PT SPM terjadi di sekitar hutan alam sekunder, di mana masih berlangsung aktivitas penebangan liar. Saat verifikasi lapangan, suara gergaji mesin terdengar dari kejauhan. Bahkan, tim berjumpa dengan dua orang penebang pohon yang tengah menyusun kayu hasil olahan.

TEMUAN KEBAKARAN DI DUA PERUSAHAAN ASAL MALAYSIA DI KALTENG

Pemantauan WALHI Kalimantan Tengah terhadap dua perusahaan yang terafiliasi dengan Genting Group asal Malaysia, PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia, menemukan setidaknya 24 titik kebakaran yang tersebar di kedua wilayah izin tersebut. Titik-titik kebakaran berada pada beberapa kelompok lokasi di dalam dan sekitar area konsesi, termasuk wilayah yang berbatasan dengan lahan masyarakat dan kawasan berhutan. Luas lahan perusahaan yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektare. Sebagian wilayah diketahui memiliki karakteristik lahan gambut dengan kedalaman ± 1 meter.

Ada Lima Sosok Pebisnis Terdekat Presiden



Analisis aktor kami menemukan setidaknya ada empat sosok pebisnis terdekat dengan Presiden Prabowo Subianto melalui kepemilikan terhadap tiga entitas perusahaan, Iwan Bomba di balik PT Golden Blossom Sumatera, Aburizal Bakrie di PT Monrad Intan Barakat, dan Edhy Prabowo, Widjono Hardjanto, dan Benny Pangbin di PT Kiani Lestari.

Penelusuran terhadap PT Golden Blossom Sumatera yang terafiliasi dengan Bomba Group, memunculkan nama Iwan Bomba sebagai pemilik Bomba Group. Group ini awalnya didirikan oleh PT Gozco Plantation pada 2006 dan diakuisisi oleh PT Mitra Lintas Persada (MLP) pada Agustus 2019.¹⁸ Iwan Bomba atau Setiawan Ichlas, pemilik Bomba Group, adalah seorang pengusaha batu bara atau konglomerat asal Palembang, dan saat Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden, Iwan Bomba dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan.¹⁹ Sebelum ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden, Iwan Bomba aktif memberikan kontribusi politik sebagai bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.²⁰

18 Golden Blossom Sumatra, "Golden Blossom Sumatra", <https://www.gbs.id/id>

19 InvestorTrust, "Jadi Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Ini Profil Setiawan Ichlas 'Crazy Rich' Palembang," 23 Oktober 2024, <https://investortrust.id/financial/45159/jadi-utusan-khusus-presiden-bidang-ekonomi-dan-perbankan-ini-profil-setiawan-ichlas-crazy-rich-palembang>

20 Kumparan, "Profil Setiawan Ichlas, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan," 24 Oktober 2024, <https://kumparan.com/profil-tokoh/profil-setiawan-ichlas-utusan-khusus-presiden-bidang-ekonomi-dan-perbankan-23mAay9bRG7>



Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
dan Ketua Umum Partai Gerindra



Dalam laporan Tempo berjudul “Sosok Iwan Bomba, Pengusaha Batu Bara yang jadi Utusan Khusus Prabowo”, Iwan Bomba disebut pernah terseret dalam polemik sengketa kredit macet PT Titan Infra Energy di Bank Mandiri senilai US\$450 juta.²¹ Namanya dikaitkan dengan dugaan upaya pengambilalihan aset strategis terkait bisnis batu bara di Sumatera Selatan, meski melalui kuasa hukumnya ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan perkara tersebut merupakan sengketa korporasi biasa.

Selain Iwan Bomba, kami juga menemukan perusahaan milik, Aburizal Bakrie, yaitu PT Monrad Intan Barakat di Kalimantan Selatan yang terindikasi karhutla.²² Aburizal Bakrie, mantan menteri dan pendiri dan tokoh utama

21 Tempo, “Sosok Iwan Bomba, Pengusaha Batu Bara yang Jadi Utusan Khusus Prabowo,” 24 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/sosok-ivan-bomba-pengusaha-batu-bara-yang-jadi-utusan-khusus-prabowo-1144187>

22 CNBC Indonesia, “9 Konglomerat Ini Bisa Cuan Besar Usai Prabowo Sah Jadi Presiden,” 23 April 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240423101625-128-532536/9-konglomerat-ini-bisa-cuan-besar-usai-prabowo-sah-jadi-presiden>

Grup Bakrie, memiliki kedekatan dengan pemerintahan Prabowo Subianto melalui posisinya sebagai anggota Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pemilu 2024. Dalam jaringan bisnis Grup Bakrie, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) merupakan induk perusahaan PT Monrad Intan Barakat (MIB). Hubungan tersebut tercantum dalam *Annual Report* tahun 2025²³ dan Laporan ESG 2025 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, yang menempatkan PT Monrad Intan Barakat sebagai entitas anak dalam kelompok usaha UNSP.

PT Monrad Intan Barakat sendiri, pernah tersangkut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019 di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini tercatat memiliki sekitar 146 *hotspot* di area konsesinya dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam penanganan kasus karhutla.

Selanjutnya, penelusuran susunan pengurus dan pemegang saham pada rantai kepemilikan PT Kiani Lestari. PT Kiani Lestari, yang sebelumnya dikenal sebagai Kiani Kertas milik Bob Hasan, memiliki sejarah keterkaitan dengan Nusantara Energy Group pada periode 2004-2009, yang pada masa itu turut melibatkan Prabowo Subianto sebagai pemegang saham mayoritas konsorsium pemenang lelang, sehingga korporasi ini hingga kini tetap berada dalam lingkup kelompok usaha yang sama.²⁴ Penelusuran kami menunjukkan bahwa dalam jajaran direksi ditemukan nama Benny Pangbin Gayonie yang saat ini termasuk ke dalam susunan pengurus Partai Gerindra sebagai Ketua Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi Kader.

Mayoritas saham PT Kiani Lestari sekarang dipegang oleh PT Bali Pasific Investama.²⁵ Dalam susunan pengurus dan pemegang saham PT Bali Pasific Investama, tercatat nama Widjono Hardjono dan Edhy Prabowo. Widjono Hardjanto yang menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Bali Pasific Investama dan Komisaris pada PT Nusantara Agro Forestry dikenal sebagai salah satu eksekutif kepercayaan Prabowo Subianto yang turut membesarkan Nusantara Group sejak awal 2000-an, bersama Hashim Djojohadikusumo dan Bambang Atmadja.²⁶ Ia tercatat pula sebagai salah

23 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., Annual Report 2025, 2026, <https://www.bakriesumatera.com/storage/documents/2026/05/AR2025%20BSP.pdf>

24 "Lika-Liku Kepemilikan Lahan Ratusan Ribuan Hektare PT Kiani dan Prabowo," Katadata.co.id, 21 Februari 2019, <https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a55230ae60/lika-liku-kepemilikan-lahan-ratusan-ribuan-hektare-pt-kiani-dan-prabowo>.

25 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, <https://gerindra.id/wp-content/uploads/2022/08/SUSUNAN-PENGURUS-DEWAN-PIMPINAN-PUSAT-PARTAI-GERINDRA.pdf>

26 "Prabowo Jadi Calon Presiden Terkuat, Segini Jumlah Hartanya," CNBC Indonesia, 25 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230925085332-17-475182/prabowo-jadi-calon-presiden-terkuat-segini-jumlah-hartanya>

satu pemegang saham minoritas dalam konsorsium PT Anugrah Cipta Investama dan PT Nusantara Energy yang memenangkan lelang PT Kiani Kertas dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Oktober 2002. Selain terhubung dalam rantai bisnis Prabowo Subianto, Widjono Hardjanto juga masuk dalam jajaran pengurus Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Harian. Pada pencalonan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 lalu, Widjono tergabung sebagai Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran.²⁷ Namanya saat ini tercatat sebagai Komisaris Independen di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nusantara Power.²⁸

Selanjutnya, Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Kiani Lestari sekaligus salah satu pemegang saham PT Nusantara Agro Forestry. Ia dikenal luas sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019 sampai dengan 2020 dan mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, yang diberhentikan dan diproses secara pidana atas perkara korupsi izin ekspor benih lobster, dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakannya bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kader Partai Gerindra ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dari tahun 2012 sampai 2020.²⁹

Fakta-fakta ini menimbulkan kekhawatiran penting, baik dari perspektif tata kelola maupun kerangka hukum lingkungan. Pertama, keterlibatan seorang mantan pejabat publik—yang pernah divonis bersalah atas tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam—dalam jajaran pimpinan perusahaan kehutanan yang terkait dengan banyaknya titik api (hotspot) kebakaran hutan, menimbulkan keraguan terhadap integritas upaya saat ini dalam mewujudkan tata kelola sumber daya yang transparan dan berkelanjutan. Kedua, rekam jejak para pengambil keputusan perusahaan yang pernah terlibat dalam kasus korupsi sumber daya alam sebelumnya harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan manajemen perusahaan yang beroperasi berdasarkan izin pemanfaatan hutan. Memasukkan pertimbangan semacam itu ke dalam proses perizinan dan pengawasan mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang diperlukan untuk memitigasi risiko terkait tata kelola dan lingkungan.

27 Project Multatuli, “Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran,” 8 Februari 2024, <https://projectmultatuli.org/jejaring-pengusaha-tambang-hingga-media-di-lingkaran-tnk-prabowo-gibran/>

28 PT PLN Nusantara Power, Profil Perusahaan PLN Nusantara Power, https://www.plnnusantarapower.co.id/storage/investor_company_profile/sections/PZfjIQUyBAAWN4gOXYzXMnzS-gCkxAnGB4Seu8G6J.pdf

29 “Biodata Edhy Prabowo Menteri KKP & Hubungan dengan Prabowo Subianto,” Tirto.id, 25 November 2020, <https://tirto.id/biodata-edhy-prabowo-menteri-kkp-hubungan-dengan-prabowo-subianto-f7nu>

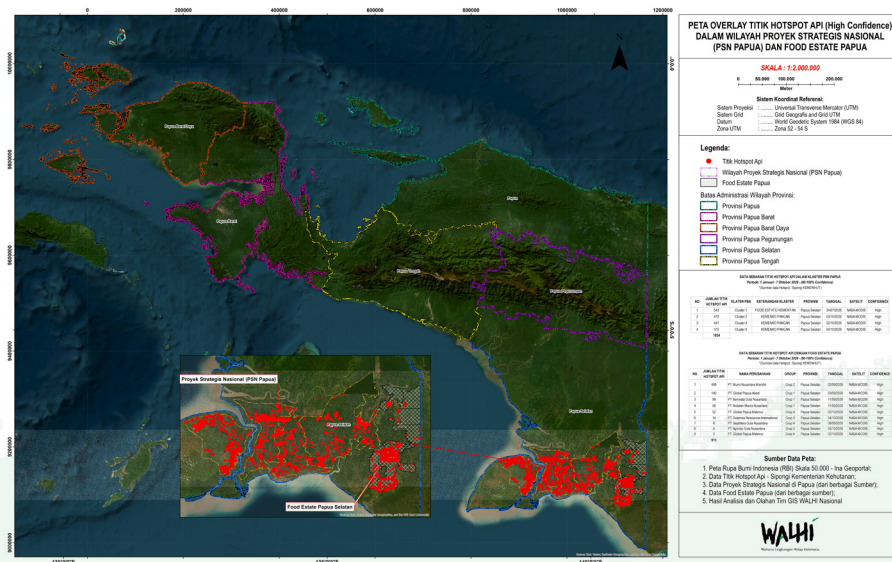
Gambar 4. Temuan Kebakaran Hutan dan Lahan di PT Monrad Intan Barakat, September 2026. (dok. WALHI Kalimantan Selatan)



3

Konglomerat di Balik Titik Panas PSN Pangan dan Energi Papua

Analisis data spasial WALHI menemukan setidaknya 807 titik panas pada Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi—Program Strategis Nasional—di Merauke, Papua Selatan. Berikut rincian lokasinya.



Daftar perusahaan terindikasi karhutla di Papua

No	Nama Perusahaan	Asal Grup	Jumlah Titik Panas
PSN ENERGY ESTATE			
1	PT Global Papua Abadi	First Resources	57
2	PT Murni Nusantara Mandiri	Wilmar	40
3	PT Andalan Manis Nusantara	First Resources	23
4	PT Semesta Gula Nusantara	First Resources	10
5	PT Sejahtera Gula Nusantara	Wilmar	2
6	PT Agrindo Gula Nusantara	Wilmar	1
PSN FOOD ESTATE			
	Cluster	Pengampu	
7	Cluster 4	Kemenko Pangan	236
8	Cluster 1	Kemenko Pangan	179
9	Cluster 2	Kemenko Pangan	172
10	Cluster 5	Food Estate/Kementan	87
TOTAL			807

Tabel 5



Data tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi hotspot pada PSN Energy Estate ini tidak berdiri sendiri pada masing-masing perusahaan, melainkan bermuara pada dua kelompok usaha besar yang sebelumnya telah teridentifikasi menguasai sepuluh pemegang konsesi kebun tebu, pabrik gula, dan bioetanol di kawasan tersebut. Dua kelompok usaha ini, yakni First Resources Limited melalui kepemilikan saham keluarga Fangiono, dan Wilmar International Group melalui Tan Keng Liam serta keterlibatan Martua Sitorus.

Dari enam entitas yang tercatat dalam data titik panas tertinggi, tiga di antaranya, yakni PT Semesta Gula Nusantara, PT Andalan Manis Nusantara, dan PT Global Papua Abadi, konsisten berada dalam satu kelompok kepemilikan yang sama, First Resources. Ketiga entitas ini menyumbang sembilan puluh titik panas dari total yang tercatat pada kelompok tersebut, dengan PT Global Papua Abadi sebagai penyumbang tertinggi. Tiga entitas lainnya, yaitu PT Murni Nusantara Mandiri, PT Agrindo Gula Nusantara, dan PT Sejahtera Gua Nusantara, seluruhnya berafiliasi dengan Wilmar International Group, dengan PT Murni Nusantara Mandiri sebagai kontributor dominan pada kelompok ini. Pengelompokan tersebut menegaskan bahwa sebaran titik panas pada korporasi di dalam PSN Energi Papua pada dasarnya terpusat pada dua rantai kendali korporasi yang sama, sehingga persoalan karhutla di kawasan ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan operasional pada tingkat kelompok usaha First Resources dan Wilmar Internasional, bukan semata-mata kelalaian pada tingkat anak usaha secara individual.

Di luar konsesi yang dipegang oleh korporasi swasta tersebut, data titik panas pada kawasan Food Estate di lokasi yang berdekatan turut

menunjukkan sebaran yang signifikan pada area yang secara administratif berada di bawah pengampunan langsung lembaga pemerintah, bukan pada badan hukum swasta tertentu. Area dengan pengampu Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) tercatat pada tiga kluster, yaitu: 1) Kecamatan Ngguti, Desa Salam Epe; 2) Kecamatan Ilwayab, Desa Sigad; dan 3) Kecamatan Ilwayab, Desa Bibikem. Sementara area dengan pengampu Kementerian Pertanian tercatat di Kecamatan Kaptel, Desa Bu-Epe. Jumlah titik panas pada keempat kluster program pangan ini bahkan melampaui jumlah titik panas pada masing-masing entitas korporasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan total 674 titik panas pada area yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi negara.



Haji Isam di balik Food Estate Merauke

Sebagian kluster titik panas di Kecamatan Ilwayab berada di wilayah kerja Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, yang ditugaskan negara untuk pembukaan lahan food estate, meski tautan langsung antara aktivitas Jhonlin dan titik panas spesifik masih memerlukan verifikasi lapangan lebih lanjut. Temuan ini menyoroti celah akuntabilitas baru: mitra pelaksana swasta yang beroperasi atas penugasan negara, di luar rezim perizinan usaha kehutanan/lahan yang lazim, berpotensi mengaburkan tanggung jawab hukum antara pemberi tugas (pemerintah) dan pelaksana lapangan (mitra swasta). Diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap aktor-aktor, dokumen perjanjian yang mendasarinya.



Gambar 5. Temuan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN Papua) dan Food Estate Papua. (dok. Ambrosius Mulait)

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla pada PSN Pangan dan Energi Papua memiliki struktur pertanggungjawaban bersama. Pada satu sisi, terdapat pertanggungjawaban korporasi yang dapat ditelusuri melalui rantai kepemilikan First Resources dan Wilmar International sebagaimana diatur dalam kerangka Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada sisi lain, konsentrasi titik api pada area yang pengampunya adalah Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian menempatkan persoalan ini pada ranah pertanggungjawaban kelembagaan pemerintah sebagai penggagas dan koordinator program *food estate*, termasuk kewajiban memastikan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilaksanakan secara memadai sebelum dan selama pembukaan lahan berlangsung. Dengan demikian, respons kebijakan maupun penegakan hukum terhadap karhutla di kawasan ini perlu menjangkau baik korporasi pemegang konsesi maupun lembaga pemerintah yang mengampu langsung proyek strategis nasional tersebut, alih-alih membatasi akuntabilitas hanya pada aktor korporasi.

Pengulangan Afiliasi Kelompok Usaha dan Pertanggungjawabannya

Temuan lain yang patut mendapat perhatian adalah berulangnya nama sejumlah kelompok usaha besar pada lebih dari satu entitas usaha dalam daftar perusahaan dengan hotspot paling tinggi. Kelompok First Resources/keluarga Fangiono, misalnya, teridentifikasi berafiliasi dengan setidaknya 2 entitas pada kelompok konsesi sawit, yaitu PT Kayung Agro Lestari dan PT Panca Surya Agrindo, dan 3 entitas pada kelompok konsesi PSN Pangan dan Energi Merauke, yaitu PT Semesta Gula Nusantara, PT Andalan Manis Nusantara, dan PT Global Papua Abadi. Kelompok Sinar Mas/keluarga Widjaja melalui PT Purinusa Ekapersada teridentifikasi berafiliasi dengan PT Finnantara Intiga dan diduga kuat pula berafiliasi dengan PT Bumi Mekar Hijau. Sedangkan pola kepengurusan yang serupa antara kelompok usaha di bawah bendera Wilmar International turut ditemukan pada entitas di kelompok konsesi PBPH, yaitu PT Wahana Samudera Sentosa dan 3 entitas pada kelompok konsesi PSN Pangan dan Energi Merauke, yaitu PT Murni Nusantara Mandiri, PT Agrindo Gula Nusantara, dan PT Sejahtera Gua Nusantara. Daftar ini akan lebih panjang apabila kita turut memasukkan perusahaan-perusahaan lain di bawah 20 besar.

Pengulangan ini menegaskan bahwa persoalan karhutla di sejumlah konsesi—yang jika ditelusuri tergabung dalam kelompok usaha tertentu—bukanlah insiden yang berdiri sendiri pada masing-masing badan hukum saja, melainkan mencerminkan praktik struktural pada tingkat kelompok usaha (corporate group) yang menaungi banyak anak perusahaan dengan badan hukum terpisah. Dalam kerangka Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya dapat dibebankan baik kepada badan usaha maupun kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Namun, penerapannya terhadap struktur kelompok usaha yang menggunakan banyak badan hukum anak perusahaan sebagai perisai tanggung jawab (corporate veil) masih menghadapi kendala pembuktian, khususnya dalam menjangkau perusahaan induk atau pemegang kendali yang tidak secara langsung mengoperasikan lahan yang terbakar.³⁰

30 Konsep “budaya korporasi” (corporate culture) merujuk pada sikap, kebijakan, aturan, pola tindakan, atau praktik yang berlaku secara umum di dalam suatu badan hukum, atau pada bagian badan hukum tempat perilaku yang relevan terjadi, yang dapat dijadikan dasar pembuktian unsur kesalahan korporasi tanpa harus menunjuk kesalahan individu tertentu. Lihat penjelasan lebih lanjut pada Brent Fisse and John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), chap. 2; bandingkan Criminal Code Act 1995 (Cth) s 12.3(2); Attorney-General’s Department (Australia), “12.3 Fault Elements Other than Negligence,” dalam *Commonwealth Criminal Code: A Guide for Practitioners*, <https://www.ag.gov.au/crime/publications/commonwealth-criminal-code-guide-practitioners-draft/part-25-corporate-criminal-responsibility/division-12/123-fault-elements-other-negligence>.



Gambar 6. Temuan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah.
(dok. WALHI Kalimantan Tengah)

Hal ini juga mempertegas arah pertanggungjawaban yang seharusnya dituju. Pihak yang secara proporsional patut dimintai pertanggungjawaban bukan semata-mata anak usaha yang secara administratif tercatat sebagai pemegang izin di lokasi konsesi saja, melainkan induk usaha atau entitas yang secara faktual memegang kendali atas kebijakan operasional lintas anak usaha pula, yaitu First Resources Ltd., Wilmar International Group, dan kelompok Sinar Mas. Kendali faktual ini bukan semata-mata bentuk kepemilikan saham secara formal yang seharusnya menjadi dasar penerapan doktrin piercing the corporate veil atau single economic entity dalam konteks hukum lingkungan Indonesia.³¹

31 Phillip I. Blumberg, *The Law of Corporate Groups: Procedural Problems in the Law of Parent and Subsidiary Corporations* (Boston: Little, Brown and Company, 1983); bandingkan dengan kajian doktrin serupa dalam konteks hukum perusahaan Indonesia pada Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil)*: Kapita Selekta Hukum Perusahaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituju pun sepatutnya berlapis, di antaranya:



Secara administratif, pengawasan dan sanksi oleh kementerian terkait seharusnya menjangkau seluruh anak usaha dalam satu kelompok usaha begitu pola pelanggaran serupa teridentifikasi pada lebih dari satu entitas, bukan hanya menyasar anak usaha yang terbakar pada periode tertentu saja³²



Secara perdata, gugatan pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sepatutnya turut diarahkan kepada induk usaha yang terbukti memiliki kendali efektif atas kebijakan pengelolaan lahan di area, bukan berhenti pada anak usaha sebagai pihak yang digugat³³



Secara pidana, unsur kesalahan korporasi pada tingkat induk usaha dapat dibangun dari bukti kelalaian dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan anak usaha terhadap kebijakan pencegahan kebakaran yang telah ditetapkan sendiri oleh kelompok usaha yang bersangkutan³⁴



32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 dan Pasal 82, yang mengatur ragam sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan

33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87

34 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, khususnya ketentuan mengenai dasar pemidanaan korporasi berdasarkan kelalaian dalam pengawasan yang patut dan wajar terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus atau bagian dari korporasi.



Gambar 7. Temuan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Bengkalis, Provinsi Riau.
(dok. WALHI Riau)

Poin terakhir ini relevan karena sebagian kelompok usaha yang teridentifikasi di atas sesungguhnya telah memiliki kebijakan pencegahan kebakaran pada tingkat kelompok (*group-wide-self-regulation*). Wilmar International Group, misalnya, telah mempublikasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) sejak Desember 2013 yang secara eksplisit melarang penggunaan api dalam pembukaan maupun penanaman ulang lahan di seluruh rantai pasoknya, termasuk pemasok pihak ketiga.³⁵ First Resources Limited juga telah menerapkan kebijakan NDPE sejak 2015, disertai program Integrated Fire Management (IFM) di tingkat kelompok usaha.³⁶ Kebijakan semacam ini, jika benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal, seharusnya diteruskan secara konsisten dari induk usaha ke setiap anak usahanya, termasuk mekanisme evaluasi dan koreksi begitu ditemukan pelanggaran pada salah satu anak usahanya agar pola yang sama tidak berulang pada anak usaha lain dalam kelompok yang sama.

35 Wilmar International, No Deforestation, No Peat and No Exploitation Policy, 5 Desember 2013, diakses melalui <https://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>.

36 First Resources Limited, Sustainability Report 2015 (Singapura: First Resources Ltd, 2015); First Resources Limited, Sustainability Report 2018 (Singapura: First Resources Ltd, 2018); lihat juga "First Resources the Latest Palm Oil Giant to Announce Zero-Deforestation Commitment," Mongabay, 2015, <https://news.mongabay.com/2015/07/first-resources-the-latest-palm-oil-giant-to-announce-zero-deforestation-commitment/>.



Gambar 8. Karhutla di Provinsi Jambi, Pulau Sumatera. (dok. WALHI Jambi)

Persoalannya, data yang telah diuraikan di atas justru menunjukkan bahwa titik panas tinggi terjadi berulang pada beberapa anak usaha yang berbeda dalam kelompok usaha yang sama, bahkan pada periode maupun kawasan konsesi yang berlainan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut: jika memang komitmen pencegahan kebakaran pada tingkat kelompok benar-benar ditegakkan, seharusnya ditemukan langkah korektif yang nyata—seperti audit internal, penghentian sementara aktivitas pembukaan lahan, atau evaluasi manajemen anak usaha—setelah pelanggaran pertama terjadi pada salah satu entitas sehingga mencegah pengulangan pada entitas lainnya.

Sayangnya, hingga kajian ini disusun, tidak ada indikasi bahwa langkah korektif semacam itu dapat dibaca sebagai bukti bahwa kebijakan *self-regulation* tersebut belum berfungsi sebagai norma operasional yang mengikat secara nyata di lapangan, melainkan sebatas dokumen kepatuhan formal pada tingkat induk usaha. Kondisi ini memperkuat relevansi pendekatan *corporate culture*.³⁷ Sekaligus menjadi salah satu bentuk bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang dapat digunakan untuk membangun argumentasi kelalaian pada tingkat kelompok usaha—atau induk usaha. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas apa yang terjadi seharusnya diarahkan untuk menjangkau kelompok usaha yang secara nyata mengendalikan kebijakan pengelolaan lahan pada konsesi-konsesi bersangkutan, bukan berhenti pada badan hukum anak usaha semata.

37 Konsep “budaya korporasi” (*corporate culture*) merujuk pada sikap, kebijakan, aturan, pola tindakan, atau praktik yang berlaku secara umum di dalam suatu badan hukum, atau pada bagian badan hukum tempat perilaku yang relevan terjadi, yang dapat dijadikan dasar pembuktian unsur kesalahan korporasi tanpa harus menunjuk kesalahan individu tertentu. Lihat penjelasan lebih lanjut pada Brent Fisse and John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), chap. 2; bandingkan Criminal Code Act 1995 (Cth) s 12.3(2); Attorney-General’s Department (Australia), “12.3 Fault Elements Other than Negligence,” dalam *Commonwealth Criminal Code: A Guide for Practitioners*, <https://www.ag.gov.au/crime/publications/commonwealth-criminal-code-guide-practitioners-draft/part-25-corporate-criminal-responsibility/division-12/123-fault-elements-other-negligence>.



Gambar 9. Karhutla di Provinsi Jambi, Pulau Sumatera. (dok. WALHI Jambi)

E

Kesimpulan



Karhutla 2026 menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipahami hanya pada tingkat perusahaan pemegang izin maupun peristiwa kebakaran yang terjadi di lapangan. Sebaran titik panas yang terkonsentrasi pada areal konsesi perkebunan dan kehutanan memperlihatkan adanya keterkaitan yang lebih luas dengan struktur penguasaan lahan, jaringan korporasi, dan tata kelola sumber daya alam yang selama ini berlangsung.

Penelusuran terhadap perusahaan dengan hotspot tertinggi mengungkap bahwa sebagian di antaranya terhubung dengan kelompok usaha besar yang memiliki rantai kepemilikan lintas negara, termasuk melalui entitas yang berkedudukan di Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, hingga yurisdiksi yang memiliki tingkat transparansi rendah seperti British Virgin Islands dan Samoa. Pada sejumlah kasus, identifikasi pemilik manfaat akhir masih sulit dilakukan karena struktur kepemilikan yang berlapis dan minimnya keterbukaan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi korporasi masih menjadi tantangan penting dalam upaya menelusuri pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Temuan lain menunjukkan adanya keterkaitan sejumlah perusahaan dengan figur yang memiliki kedekatan politik maupun posisi strategis dalam lingkaran kekuasaan. Selain itu, konsentrasi titik panas di kawasan PSN Pangan dan Energi Merauke memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan korporasi, tetapi juga menyentuh aspek tanggung jawab kelembagaan negara dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program pembangunan skala besar.



Gambar 10. Petugas sedang memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat. (dok. WALHI Kalimantan Barat)

Berulangnya kemunculan kelompok usaha yang sama pada berbagai entitas dengan tingkat hotspot tinggi mengindikasikan bahwa risiko karhutla perlu dianalisis pada tingkat kelompok usaha, bukan semata-mata pada anak perusahaan sebagai pemegang izin. Pola tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal, pelaksanaan komitmen pencegahan kebakaran, serta tata kelola korporasi yang diterapkan di seluruh rantai kendali usaha.

Karena itu, penanganan karhutla ke depan perlu diarahkan pada penguatan transparansi pemilik manfaat, penelusuran pertanggungjawaban hingga tingkat kelompok usaha, evaluasi menyeluruh terhadap konsesi yang berulang kali mengalami kebakaran, serta penguatan akuntabilitas pemerintah dan korporasi dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang terus berulang.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pengurus negara, antara lain:

1

Melakukan evaluasi menyeluruh perizinan, baik Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Izin Usaha Pertambangan, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya, secara khusus yang terdapat di ekosistem gambut dan hutan.

2

Memberikan sanksi administratif kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin yang terbukti terdapat kebakaran hutan dan lahan di konsesinya dan/atau mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di sekitar konsesinya. Sanksi administrasi yang dimaksud:

- Paksaan Pemerintah
- Pembekuan Perizinan Berusaha
- Penghentian Layanan Pemerintah
- Pencabutan Perizinan Berusaha
- Denda Administratif

3

Memberikan paksaan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin yang terbukti terdapat kebakaran hutan dan lahan di konsesinya dan/atau mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di sekitar konsesinya. Khususnya:

- Penghentian sementara kegiatan produksi
- Pemblokiran
- Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- Penghentian sementara seluruh kegiatan

4

Sanksi administrasi yang dimaksud dalam poin 2 huruf d serta paksaan pemerintah dalam poin 3 huruf a dan c harus diikuti dengan pencutan konsesi.

5

Paksaan pemerintah yang dimaksudkan dalam poin 3 huruf d juga termasuk menarik keistimewaan perusahaan-perusahaan pemegang izin yang terbukti terdapat Kebakaran Hutan dan Lahan di konsesinya dan/atau mengakibatkan Kebakaran Hutan dan Lahan di sekitar konsesinya untuk mendapatkan pinjaman/pendanaan dari bank.

6

Lahan-lahan bekas konsesi yang perizinan berusahanya telah dicabut atau hasil pencutan konsesi tidak boleh dialihkan kepada pelaku usaha lain atau dijadikan konsesi dengan perizinan berusaha baru. Kecuali lahan-lahan bekas konsesi yang berkonflik dengan masyarakat adat, lahan konsesi tersebut wajib dikembalikan kepada masyarakat adat.



Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Criminal Code Act 1995 (Cth) (Australia).

Buku

Ais, Chatamarrasjid. Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Blumberg, Phillip I. The Law of Corporate Groups: Procedural Problems in the Law of Parent and Subsidiary Corporations. Boston: Little, Brown and Company, 1983.

Fisse, Brent, dan John Braithwaite. Corporations, Crime and Accountability. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Laporan, Dokumen Perusahaan, dan Publikasi Lembaga

APRIL Group. "APRIL Fiber Supply Source – APRIL Sustainability Dashboard." Diperbarui per 31 Agustus 2026. <https://sustainability.aprilasia.com/april-fiber-supply-source/>.

Attorney-General's Department (Australia). "12.3 Fault Elements Other than Negligence." Dalam Commonwealth Criminal Code: A Guide for Practitioners. <https://www.ag.gov.au/crime/publications/commonwealth-criminal-code-guide-practitioners-draft/part-25-corporate-criminal-responsibility/division-12/123-fault-elements-other-negligence>.

Bursa Efek Indonesia. "[Dokumen Keterbukaan Informasi PT Triputra Agro Persada Tbk]." April 2021. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202104/960f00ca8c_d89a475e3a.pdf.

Bursa Efek Indonesia (BEI), "Profil Perusahaan Tercatat: CEKA," <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/CEKA>.

EcoNusa. Studi Rantai Pasok Gula di Indonesia Timur. <https://econusa.id/id/publikasi/studi-rantai-pasok-gula-di-indonesia-timur/>.

First Resources Limited. Sustainability Report 2015. Singapura: First Resources Ltd, 2015.

First Resources Limited. Sustainability Report 2018. Singapura: First Resources Ltd, 2018.

Golden Blossom Sumatra. "Golden Blossom Sumatra." <https://www.gbs.id/id>.

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). "An 'Anonymous' Company Secretly Linked to an Indonesian Billionaire Is Destroying Borneo's Rainforests, Environmentalists Say." 2 Desember 2025. <https://www.icij.org/investigations/deforestation-inc/an-anonymous-company-secretly-linked-to-an-indonesian-billionaire-is-destroying-borneos-rainforests-environmentalists-say/>.

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). "Premier Palmoil Energy Pte. Ltd." Offshore Leaks Database. <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12170972>.

Mighty Earth. "Letter from Government Ministry Tells Indonesia's Largest Deforester to Stop Clearing." 23 April 2024. <https://mightyearth.org/article/letter-from-government-ministry-tells-mayawana-persada-to-stop-clearing/>.

Mighty Earth. Rapid Response Report No. 23. Januari 2020. https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/Rapid-Response-Report-23_final.pdf.

Mighty Earth. Rapid Response Report No. 49. Maret 2025. https://mightyearth.org/wp-content/uploads/2025/10/RR49_v3.pdf.

Musim Mas. "Keberadaan Global." <https://www.musimmas.com/id/tentang-kami/keberadaan-global/>.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. <https://gerindra.id/wp-content/uploads/2022/08/SUSUNAN-PENGURUS-DEWAN-PIMPINAN-PUSAT-PARTAI-GERINDRA.pdf>.

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Annual Report 2025. 2026. <https://www.bakriesumatera.com/storage/documents/2026/05/AR2025%20BSP.pdf>.

PT PLN Nusantara Power. Profil Perusahaan PLN Nusantara Power. https://www.plnnusantarapower.co.id/storage/investor_company_profile/sections/PZfjlQUyBAAWN4gOXYzXMnzSgCkxAnGB4Seu8G6J.pdf.

Premier Palmoil Energy Pte. Ltd. "Premier Palmoil Energy Pte. Ltd." SGPBusiness. <https://www.sgpbusiness.com/company/Premier-Palmoil-Energy-Pte-Ltd>.

PT Triputra Agro Persada Tbk. Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham. Jakarta: PT Triputra Agro Persada Tbk., 1 April 2021. https://www.idx.co.id/media/9769/14_-tapg-prospektus-ipo-2021.pdf.

Singapore Exchange (SGX), "Highlights of Foreign Family Empires Listed on SGX," 9 Mei 2019, <https://www.sgx.com/research-education/market-updates/20190509-highlights-foreign-family-empires-listed-sgx>.

Sustainability Dashboard. "Ringkasan Publik PT Finnantara Intiga 2025." 2025. https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.FI_2025.pdf.

WALHI. "WALHI Laporkan 194 Perusahaan yang Terduga Terbakar." 21 Oktober 2026. <https://www.walhi.or.id/walhi-laporkan-194-perusahaan-yang-terduga-terbakar>.

Wilmar International. No Deforestation, No Peat and No Exploitation Policy. 5 Desember 2013. <https://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>.

Wilmar International, "Corporate Profile," <https://www.wilmar-international.com/about-us/corporate-profile>.

Berita dan Artikel Daring

Antara News. "Grup Sampoerna Jual Seluruh Saham SGRO kepada AGPA Pte. Ltd." 20 November 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5253877/grup-sampoerna-jual-seluruh-saham-sgro-kepada-agpa-pte-ltd>.

Betahita.id. "Investigasi Mayawana: Pemilik Maya, Kerusakan Nyata." 13 Mei 2024. <https://www.betahita.id/sorot/10098/investigasi-mayawana-pemilik-maya-kerusakan-nyata>.

Bisnis.com. "Austindo (ANJT) Rombak Pengurus Usai Diakuisisi First Resources." 7 Mei 2025. <https://market.bisnis.com/read/20250507/192/1875266/austindo-anjt-rombak-pengurus-usai-diakuisisi-first-resources>.

Bisnis.com. "Entitas Usaha Triputra Group di Bidang Agribisnis Bakal IPO, Lepas 925 Juta Saham." 18 Maret 2021. <https://market.bisnis.com/read/20210318/192/1369276/entitas-usaha-triputra-group-di-bidang-agribisnis-bakal-ipo-lepas-925-juta-saham>.

Bisnis.com. "Selesai Akuisisi, First Resources Lanjutkan Tender Wajib ANJT Rp1.813 per Saham." 25 Agustus 2025. <https://market.bisnis.com/read/20250825/192/1905206/selesai-akuisisi-first-resources-lanjutkan-tender-wajib-anjt-rp1813-per-saham>.

CNBC Indonesia. "9 Konglomerat Ini Bisa Cuan Besar Usai Prabowo Sah Jadi Presiden." 23 April 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240423101625-128-532536/9-konglomerat-ini-bisa-cuan-besar-usai-prabowo-sah-jadi-presiden>.

CNBC Indonesia. "Jual 80% Saham Hutan Ketapang, SGRO Kantongin Duit Rp 990 Miliar." 28 November 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20251128095120-17-689275/jual-80-saham-hutan-ketapang-sgro-kantongin-duit-rp-990-miliar>.

CNBC Indonesia. "Prabowo Jadi Calon Presiden Terkuat, Segini Jumlah Hartanya." 25 September 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230925085332-17-475182/prabowo-jadi-calon-presiden-terkuat-segini-jumlah-hartanya>.

CNN Indonesia. "Riset Ungkap 20 Perusahaan Surga Pajak Berpusar ke Sinar Mas." 29 Mei 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180529230606-92-302109/riset-ungkap-20-perusahaan-surga-pajak-berpusar-ke-sinar-mas>.

IDX Channel, "9 Saham Milik Salim Group di Bursa Efek Indonesia, Intip Besaran Market Cap-nya," <https://www.idxchannel.com/amp/market-news/9-saham-milik-salim-group-di-bursa-efek-indonesia-intip-besaran-market-cap-nya>.

InvestorTrust. "Jadi Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Ini Profil Setiawan Ichlas 'Crazy Rich' Palembang." 23 Oktober 2024. <https://inves>

tortrust.id/financial/45159/jadi-utusan-khusus-presiden-bidang-ekonomi-dan-perbankan-ini-profil-setiawan-ichlas-crazy-rich-palembang.

Katadata.co.id. "Lika-Liku Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektare PT Kiani dan Prabowo." 21 Februari 2019. <https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a55230ae60/likaliku-kepemilikan-lahan-ratusan-ribu-hektare-pt-kiani-dan-prabowo>.

Kumparan. "Profil Setiawan Ichlas, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan." 24 Oktober 2024. <https://kumparan.com/profil-tokoh/profil-setiawan-ichlas-utusan-khusus-presiden-bidang-ekonomi-dan-perbankan-23mAay9bRG7>.

Mongabay. "First Resources the Latest Palm Oil Giant to Announce Zero-Deforestation Commitment." 2015. <https://news.mongabay.com/2015/07/first-resources-the-latest-palm-oil-giant-to-announce-zero-deforestation-commitment/>.

Project Multatuli. "Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran." 8 Februari 2024. <https://projectmultatuli.org/jejaring-pengusaha-tambang-hingga-media-di-lingkaran-tnk-prabowo-gibran/>.

Tempo. "Sosok Iwan Bomba, Pengusaha Batu Bara yang Jadi Utusan Khusus Prabowo." 24 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/sosok-iwan-bomba-pengusaha-batu-bara-yang-jadi-utusan-khusus-prabowo-1144187>.

Tirto.id. "Biodata Edhy Prabowo Menteri KKP & Hubungan dengan Prabowo Subianto." 25 November 2020. <https://tirto.id/biodata-edhy-prabowo-menteri-kkp-hubungan-dengan-prabowo>



Lampiran

1

PERUSAHAAN TERINDIKASI KARHUTLA YANG TERAFILIASI DENGAN GRUP ASAL MALAYSIA

No	Jumlah Hotspot (Jan-Sept)	Afiliasi Grup	Nama Perusahaan	Provinsi
1	121	Jcorp	PT. Sumber Mardhika Graha	Kalimantan Tengah
2	13	Genting Group	PT. Sepanjang Inti Sury Utama 1	Kalimantan Barat
3	9	Sime Darby	PT. Duta Sumber Nabati 1	Kalimantan Barat
4	1	Sime Darby	PT. Langgeng Muara Makmur 2	Kalimantan Selatan
5	7	Sime Darby	PT. Laguna Mandiri 5	Kalimantan Timur
6	7	Genting Group	PT. Sepanjang Inti Surya Utama	Kalimantan Barat
7	6	Lion Group	PT. Kebun Aria 1	Kalimantan Barat
8	2	Genting Group	PT. Sawit Sehat	Kalimantan Barat
9	11	Genting Group	PT. Sepanjang Inti Surya Abadi 1	Kalimantan Barat
10	1	Genting Group	PT. Sawit Murni	Kalimantan Barat
11	2	Sime Darby	PT. Budidaya Agro Lestari 1	Kalimantan Barat
12	2	Sime Darby	PT. Bangun Maya Indah 1	Kalimantan Barat
13	3	Genting Group	PT. Sepanjang Inti Surya Mulia	Kalimantan Barat
14	10	Genting Group	PT. Sepanjang Inti Sury Utama 2	Kalimantan Barat
15	5	Genting Group	PT. Sepanjang Inti Surya Abadi 2	Kalimantan Barat
16	1	Sime Darby	PT. Mitra Austral Sejahtera 1	Kalimantan Barat
17	1	Sime Darby	PT. Mitra Austral Sejahtera 2	Kalimantan Barat
18	8	Sime Darby	PT. Sime Indoagro	Kalimantan Barat
19	1	Synergy Drive	PT. Duta Sumber Nabati 2	Kalimantan Barat
20	9	Sime Darby	PT. Mitra Austral Sejahtera 3	Kalimantan Barat

21	3	BHD Group	PT. Sawit Desa Kapuas 6	Kalimantan Barat
22	3	BHD Group	PT. Duta Surya Pratama 2	Kalimantan Barat
23	7	BHD Group	PT. Duta Surya Pratama 3	Kalimantan Barat
24	3	BHD Group	PT. Bintang Harapan Desa	Kalimantan Barat
25	2	BHD Group	PT. Duta Surya Pratama 4	Kalimantan Barat
26	16	Lion Group	PT. Kebun Aria 3	Kalimantan Barat
27	5	BHD Group	PT. Surya Borneo Indah 3	Kalimantan Barat

2 PERUSAHAAN TERINDIKASI KARHUTLA YANG TERAFILIASI DENGAN GRUP ASAL SINGAPURA

No	Jumlah Hotspot (Jan-Sept)	Afiliasi Grup	Nama Perusahaan	Provinsi
1	320	First Resources	PT Kayung Agro Lestari	Kalimantan Barat
2	73	First Resources	PT Panca Surya Agrindo	Riau
3	207	Premier Palmoil Energy Pte Ltd	PT Arjuna Utama Sawit	Kalimantan Tengah
4	69	Salween Investment Pte Ltd ¹	PT Sumber Mardhika Graha	Kalimantan Tengah
5	196	Nordic Forest Development Holdings Pte Ltd	PT Finnantara Intiga	Kalimantan Barat
6	46	Musim Mas	PT Globalindo Alam Perkasa 1	Kalimantan Tengah
7	1	Musim Mas	PT Unggul Lestari	Kalimantan Tengah
8	19	Musim Mas	PT Globalindo Alam Perkasa 2 ²	Kalimantan Tengah
9	22	Musim Mas	PT Sukajadi Sawit Mekar 2	Kalimantan Tengah
10	7	Musim Mas	PT Maju Aneka Sawit 3	Kalimantan Tengah
11	3	Musim Mas	PT Maju Aneka Sawit 5	Kalimantan Tengah
12	2	Wilmar	PT Mentaya Sawit Mas	Kalimantan Tengah

13	35	Wilmar	PT Benua Alam Subur	Kalimantan Tengah
14	23	Wilmar	PT Petak Malai Sawit Makmur 2	Kalimantan Tengah
15	41	Wilmar	PT Pukun Mandiri Lestari	Kalimantan Tengah
16	10	RGE Group	PT Archipelago Timur Abadi	Kalimantan Tengah
17	18	Wilmar	PT Daya Landak Plantation 1	Kalimantan Barat
18	23	Wilmar	PT Petak Malai Sawit Makmur 1	Kalimantan Tengah
19	20	Wilmar	PT Bawak Sawit Tunas Belum	Kalimantan Tengah
20	8	Wilmar	PT Alam Sawit Permai	Kalimantan Tengah
21	4	Wilmar	PT Eka Kaharap Itah	Kalimantan Tengah
22	7	Wilmar	PT Kerisawit Indonesia	Kalimantan Tengah
23	1	Wilmar	PT Buluh Cawang Plantation 1	Kalimantan Barat
24	1	Wilmar	PT Wilmar Sambas Plantation 1	Kalimantan Barat
25	18	Wilmar	PT Indoiresins Putra Mandiri	Kalimantan Barat
26	6	Wilmar	PT Bumi Sawit Kencana 2	Kalimantan Tengah
27	43	Wilmar	PT Bumi Pratama Khatulistiwa 1	Kalimantan Barat
28	1	Wilmar	PT Agronusa Investama 3	Kalimantan Barat
29	5	Wilmar	PT Pratama Prosentindo	Kalimantan Barat
30	1	Wilmar	PT Putra Indotropical	Kalimantan Barat
31	2	Wilmar	PT Sarana Titian Permata	Kalimantan Tengah
32	2	Wilmar	PT Mustika Sembuluh 3	Kalimantan Tengah
33	1	Wilmar	PT Jatim Jaya Perkasa	Riau
34	6	Goodhope Asia Holdings Limited	PT Sariwana Adi Perkasa	Papua Tengah
35	65	Sinar Mas	PT Agro Majusejahtera	Kalimantan Barat
36	23	Sinar Mas	PT Kartika Prima Citra	Kalimantan Barat
37	15	Sinar Mas	PT Primanusa Mitraserasi	Kalimantan Barat
38	10	Sinar Mas	PT Bangun Nusa Mandiri	Kalimantan Barat
39	3	Sinar Mas	PT Nusantara Mukti Sentosa	Kalimantan Barat
40	6	Sinar Mas	PT Dutanusa Lestari	Kalimantan Barat
41	25	Sinar Mas	PT Smart Corporation 3	Kalimantan Barat
42	44	Sinar Mas	PT Cahaya Nusa Gemilang	Kalimantan Barat
43	3	Sinar Mas	PT Kencana Graha Permai	Kalimantan Barat
44	9	Sinar Mas	PT Anugerah Makmur Sejati	Kalimantan Barat
45	3	Sinar Mas	PT Agro Lestari Mandiri	Kalimantan Barat

46	7	Sinar Mas	PT Buana Tunas Sejahtera	Kalimantan Barat
47	8	Sinar Mas	PT Sentrakarya Manunggal	Kalimantan Barat
48	1	Sinar Mas	PT Persada Graha Mandiri	Kalimantan Barat
49	5	Sinar Mas	PT Kapuasindo Palm Lestari	Kalimantan Barat
50	3	Sinar Mas	PT Paramitra Internusa Pratama	Kalimantan Barat
51	4	Salim Group	PT Kebun Ganda Prima 2	Kalimantan Barat
52	1	Salim Group	PT Riau Agrotama Plantation 2	Kalimantan Barat
53	39	RER / APRIL- RGE Related	PT Restorasi Ekosistem Indonesia	Jambi dan Sumatera Selatan
54	22	RGE/APRIL Related Historical Structure	PT Tunas Timber Lestari (d/h PT Tunas Sawaerma)	Papua Selatan
55	2	RGE Connected / APRIL Related	PT Adindo Hutani Lestari	Kalimantan Utara
56	1	APRIL/RGE	PT Riau Andalan Pulp and Paper	Riau
57	13	APP/Sinar Mas Related	PT Buana Megatama Jaya	Kalimantan Barat
58	10	APP/Sinar Mas	PT Bumi Persada Permai (SK 337)	Sumatera Selatan
59	4	APP/Sinar Mas	PT Satria Perkasa Agung Unit (SK 102)	Riau
60	3	APP/Sinar Mas	PT Rimba Hutani Mas	Sumatera Selatan
61	2	APP/Sinar Mas	PT Wira Karya Sakti	Jambi
62	1	APP/Sinar Mas Related	PT Bukit Batu Hutani Alam	Riau
63	601	APP/Sinar Mas	PT Bumi Mekar Hijau	Sumatera Selatan
64	196	APP/Sinar Mas; historis Inhutani III + Stora Enso + Gudang Garam	PT Finnantara Intiga	Kalimantan Barat
65	21	APP/Sinar Mas	PT Sekato Pratama Makmur	Riau
66	14	APP/Sinar Mas	PT Arara Abadi	Riau



Publisher:

Eksekutif Nasional WALHI

Tegal Parang Street no.14
Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790

T/F: +62 21 7919 3363/7941 673

E: informasi@walhi.or.id

W: <https://www.walhi.or.id>

Copyright is protected by law

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2026

